

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DPRD DKI Lakukan Penyisiran APBD DKI Membengkak Rp2 Triliun

JAKARTA (Pos Kota)— DPRD DKI Jakarta dan Pemprov menyisir dengan ketat anggaran proyek pada rancangan APBD 2020. Program yang dinilai kurang bermanfaat dipastikan dicoret.

Hal tersebut untuk mencegah membengkaknya postur APBD yang menyebabkan defisit semakin besar. Dalam penyisiran tersebut, DPRD memastikan pembahasan terbuka bagi seluruh anggota. "Tidak ada istilah proyek titipan. Pembahasan dilakukan dengan sesuai dengan usulan Pemprov yang dibahas bersama komisi komisi," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Senin (25/11).

Menurut Prasetyo yang juga Ketua Badan Anggaran DPRD, pihak dewan bersama eksekutif secara bersama memangkas anggaran-anggaran yang tidak penting.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta atas usulan Pemprov membahas rancangan APBD tahun 2020. Sekitar Rp46,84 triliun dari Rp95,9 triliun diajukan

Pemprov DKI Jakarta untuk membiayai sejumlah program prioritas di bawah koordinasi 5 komisi di DPRD.

Namun, dalam pembahasan lanjutan, kenyataannya, rancangan anggaran bertambah menjadi Rp97 triliun. Penambahan terjadi terutama pada unit kerja dibawah koordinasi komisi E membidangi kesejahteraan masyarakat dan Komisi D membidangi pembangunan.

Setidaknya ada sembilan prioritas pembangunan yang diusulkan. Seluruhnya membutuhkan anggaran sebesar Rp47,84 triliun. Dari data, penambahan anggaran terutama pada program prioritas seperti untuk penataan trotoar, integrasi transportasi, pembangunan taman kota, pengadaan rumah DP 0 rupiah, pembagian kartu kesejahteraan, kartu pekerja, kartu lansia, distribusi pangan murah, perlindungan perempuan dan anak, program makanan tambahan untuk anak sekolah, pengaspalan jalan kampung, aksesibilitas Pulau Seribu

hingga hibah untuk Guru PAUD.

Sekdaprov DKI Jakarta Saefullah, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan penyisiran terhadap program program yang dinilai tidak prioritas. "Belum final, kan masih dalam pembahasan. Itu baru hasil pembahasan sementara," katanya.

Sebelumnya, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menduga pembengkakan tersebut menimbulkan kecurigaan banyaknya proyek titipan. Apalagi, Pemprov sudah menyampaikan bahwa anggaran defisit hingga Rp6,5 triliun. "Jadi aneh, anggaran defisit tapi postur anggaran justru membengkak," kata Laode Jumaidin, Ketua Forum Warga Peduli Jakarta, Sabtu (23/11).

Laode meminta, agar gubernur tidak memaksakan belanja APBD dengan kondisi keuangan defisit. "Sebab, yang menanggung pasti masyarakat karena hampir dipastikan tarif pajak dinaikkan untuk membiayai program itu,"katanya.(john/ruh)